

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	26
1. Pendekatan Penelitian.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Tahap Penelitian.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Analisis Data.....	30
6. Lokasi Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN YANG DIBUAT SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN YANG DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	32
A. Pengaturan Perjanjian Secara Umum.....	32

1. Pengertian Perjanjian.....	32
a. Perjanjian Menurut Ahli.....	32
b. Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdota.....	33
2. Syarat Sah Perjanjian.....	34
3. Berakhirnya Perjanjian.....	39
B. Perkawinan dan Pengaturannya di Indonesia.....	40
1. Perkawinan dalam Al-Quran.....	40
a. Perkawinan menurut Al-Qur'an dan As-Sunah.....	40
b. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	42
2. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45
a. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45
b. Syarat Perkawinan.....	46
c. Akibat Perkawinan.....	51
d. Pemisahan Harta dalam Perkawinan Melalui Perjanji.....	53

BAB III KASUS AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN

OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DI INDONESIA.....	69
---	-----------

A. Gambaran Umum Kasus.....	62
B. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013 Pengadilan Negeri Tuban.....	65
1. Petitum.....	65
2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	66

a. Pertimbangan Formal.....	67
b. Pertimbangan Materiil.....	69
3. Putusan.....	72
C. Putusan Pengadilan Tinggi No. 124/PDT/2014/PT.Sby.....	73
D. Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015.....	74
1. Pertimbangan Majelis Hakim.....	74
2. Putusan.....	74
E. Putusan Peninjauan Kembali No. 598 PK/PDT/2016.....	75
1. Dasar Permohonan Peninjauan Kembali.....	75
2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	78
3. Putusan.....	80
 BAB IV AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DISAHKANNYA PERJANJIAN	
MENGENAI PEMISAHAN HARTA OLEH PEGAWAI	
PENCATAT PERKAWINAN KEPADA PIHAK KETIGA	
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	
TENTANG PERKAWINAN.....	
81	
A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-	
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	81
B. Akibat Hukum Dari Tidak Disahkannya Perjanjian Perkawinan	
Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Harta yang	
diperoleh dalam Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	
Perkawinan.....	97

BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

